



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Iustitia
EST. 1849

Hak Asasi Manusia

Cecep Hidayat

cecep.hidayat@ui.ac.id - www.cecep.hidayat.com

Departemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Indonesia

Materi Bahasan

- Pengertian HAM.
 - Generasi HAM.
 - Konsepsi Non-Barat.
 - Perdebatan Internasional tentang HAM.
-

Pengertian HAM

- HAM adalah hak yang dimiliki setiap manusia, yang melekat dan inheren padanya karena dia seorang manusia.
 - Hak ini sifatnya sangat mendasar atau asasi (fundamental) dalam arti bahwa pelaksanaannya mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, serta martabatnya.
 - Hak ini dianggap universal, artinya dimiliki manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin.
-

Tiga Generasi HAM

- Generasi pertama adalah hak-hak sipil dan politik.
 - Generasi kedua adalah hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.
 - Generasi ketiga adalah hak-hak atas perdamaian dan pembangunan.
-

Generasi Pertama: Hak-Hak Sipil dan Politik (1)

- Kebanyakan negara demokrasi Barat sudah mencapai tahap negara kesejahteraan (*welfare state*) dan kebutuhan manusia sebagian besar telah terpenuhi.
 - Negara-negara itu telah memenuhi berbagai hak ekonomi seperti kehidupan yang layak, pensiun, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.
 - Proses terjadinya negara kesejahteraan di negara-negara Barat terjadi berjalan sebagai sesuatu yang sudah sewajarnya (*taken for granted*), tanpa mengacu pada perumusan hak-hak asasi manusia.
-

Generasi Pertama: Hak-Hak Sipil dan Politik (2)

- Oleh karena itu banyak negara Barat, terutama Amerika Serikat, berkeberatan jika hak-hak manusia di bidang ekonomi terlalu ditonjolkan.
 - Sebaliknya hak-hak yang bersifat politik di negara-negara Barat merupakan hasil perjuangan panjang melawan tirani, dan telah berhasil mewujudkan demokrasi dan gaya hidup yang cukup tangguh.
 - Hak politik lebih berakar dalam tradisi masyarakat Barat ketimbang hak ekonomi.
-

Generasi Kedua: Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (1)

- Diperjuangkan oleh negara-negara Komunis di PBB dan didukung oleh negara-negara Dunia Ketiga.
 - Revolusi Tsar 1917 berhasil mendirikan negara berdasarkan ideologi Marxisme-Leninisme.
 - Dalam upaya mengubah Uni Sovyet dari negara agraris yang petaninya sangat miskin menjadi negara industri, lambat laun taraf hidup rakyat berhasil ditingkatkan, sekalipun pada tahap pertama, waktu pembangunan industri besar terlalu diprioritaskan, rakyat cukup menderita.
-

Generasi Kedua: Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (2)

- Mengatasi masalah ekonomi melalui penyediaan kesempatan kerja, perumahan, serta pendidikan dianggap lebih substantif daripada pemenuhan hak-hak politik yang dianggap borjuis dan hanya prosedural.
 - Bahkan hak politik dianggap dapat mengganggu usaha mengkonsolidasi komunisme sebagai ideologi tunggal.
-

Milestones HAM (1)

- Pada tahun 1946, PBB membentuk Komisi Hak Asasi (*Commission on Human Rights*) dalam upaya untuk merumuskan hak-hak asasi yang diakui di seluruh dunia sebagai standar perilaku manusia secara universal.
 - Pada tahun 1948, komisi tersebut menghasilkan *Universal Declaration of Human Rights* sebagai kompromi negara-negara Barat dan negara-negara Timur meskipun hak-hak politik masih lebih dominan.
-

Milestones HAM (2)

- Pada tahun 1966, Sidang Umum PBB menyetujui *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik) serta *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights*. Ketiganya beserta Deklarasi Universal disebut sebagai *International Bill of Human Rights* (Undang-undang Internasional mengenai Hak Asasi).
 - Pada tahun 1976, kedua *covenant* tersebut diberlakukan.
 - Pada Februari 1993, 118 negara telah meratifikasi perjanjian ekonomi dan 115 negara meratifikasi perjanjian politik.
-

Generasi Ketiga: Hak-Hak atas Perdamaian dan Pembangunan (1)

- Dipengaruhi oleh kepentingan negara-negara Dunia Ketiga.
 - Hak-hak tersebut dituangkan dalam beberapa deklarasi:
 - *Declaration on the Right of People to Peace* (Deklarasi mengenai Hak Bangsa-Bangsa atas Perdamaian) tahun 1984.
 - *Declaration on the Right to Development* (Deklarasi mengenai Hak atas Pembangunan) tahun 1986.
-

Generasi Ketiga: Hak-Hak atas Perdamaian dan Pembangunan (2)

- Pihak negara-negara Barat kurang toleransi terhadap keinginan negara-negara Dunia Ketiga untuk mempertahankan nilai warisan nenek moyangnya.
 - *Cultural Relativism* (relativisme kultural) yaitu pemikiran bahwa HAM harus dilihat dalam konteks kebudayaan negara masing-masing, karena hal ini dapat menyebabkan perbedaan dalam pelaksanaan HAM tersebut.
-

Konsepsi Non-Barat (1)

- *Bangkok Declaration* merupakan hasil dari *UN Regional Meeting for Asia* (April 1993) yang diadakan menjelang *UN World Conference on Human Rights* di Wina. Deklarasi Bangkok ini berhasil merumuskan konsepsi-konsepsi non-Barat:
- *Universality*; Hak asasi bersifat universal, berlaku untuk semua manusia dari semua ras, agama, kelompok etnis, kedudukan sosial, dan sebagainya.
- *Indivisibility* dan *Interdependence*; Hak asasi tidak boleh dibagi-bagi atau dipilah-pilah dalam keseluruhannya. Semua hak asasi berhubungan (*interrelated*) dan bergantung satu sama lain.
- *Non-Selectivity* dan *Objectivity*; Tidak boleh memilih diantara beberapa kategori hak asasi dan menganggap bahwa satu kategori lebih penting daripada yang lain. Dalam menilai situasi dalam beberapa negara, jangan memakai standar ganda (*double standard*).

Konsepsi Non-Barat (2)

- *Right to Development*; Hak atas pembangunan adalah suatu hak asasi.
- *Non-Conditionality*; Pelaksanaan hak asasi tidak boleh menjadi syarat (*conditionality*) untuk bantuan pembangunan (*development assistance*).
- *National and Regional Particularities*; Kekhasan nasional, regional, sejarah, budaya, dan agama merupakan hal yang perlu dipertimbangkan.
- *Right to Self-Determination* (hak untuk menentukan nasib sendiri); Hak tersebut selama ini dipakai untuk melawan kolonialisme sehingga muncul banyak negara baru yang merdeka. Hak itu tidak boleh dipakai untuk merusak integritas teritorial, kedaulatan nasional dan kemerdekaan politik negara.

Perdebatan Internasional tentang HAM (1)

- **Universalisme *versus* Relativisme Kultural**
 - Paham: Universalisme
 - Rincian: HAM harus diterapkan secara sama di manapun
 - Penganut: umumnya Barat atau Utara
 - Paham yang diperdebatkan: Relativisme Kultural
 - Rincian: HAM harus diterapkan secara berbeda sesuai perbedaan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya
 - Penganut: umumnya Timur dan Selatan atau negara berkembang
-

Perdebatan Internasional tentang HAM (2)

■ Individualisme *versus* Kolektivisme

- Paham: Individualisme
- Rincian: hak individu lebih penting dan mengatasi hak kolektivitas
- Penganut: : umumnya Barat atau Utara
- Paham: Kolektivisme
- Rincian: hak kolektivitas lebih penting dan mengatasi hak individu
- Penganut: umumnya Timur dan Selatan atau negara berkembang

Perdebatan Internasional tentang HAM (3)

- Memprioritaskan hak sipil dan politik *versus* memprioritaskan hak ekonomi, sosial, dan budaya
 - Paham: Memprioritaskan hak sipil dan politik
 - Rincian: hak sipil dan politik lebih penting dan menjadi dasar dari hak ekonomi, sosial, dan budaya
 - Penganut: : umumnya Barat atau Utara
 - Paham: memprioritaskan hak ekonomi, sosial, dan budaya
 - Rincian: hak ekonomi, sosial, dan budaya lebih penting dan menjadi dasar dari hak sipil dan politik
 - Penganut: umumnya Timur dan Selatan atau negara berkembang.
- Catatan: setiap paham dalam perdebatan internasional itu seringkali hanya menjadi kedok dari perbedaan ekonomi dan politik pragmatis negara-negara penganutnya

Profil Cecep Hidayat



- Lahir pada 25 April 1978, merupakan pengajar tetap pada Departemen Ilmu Politik FISIP UI (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia). Sebelum bergabung dengan UI, Cecep telah melakukan berbagai riset terkait politik di Indonesia, dan juga politik di negara-negara Asia Tenggara. Hal ini dilakukannya sampai dengan sekarang.
- Selain mengajar dan melakukan riset, Cecep juga pernah menjadi Sekretaris Departemen dan Ketua Program Studi Ilmu Politik Jenjang Sarjana Reguler Departemen Ilmu Politik FISIP UI. Sekarang Cecep menjadi Dosen dan juga Periset UI. Selain itu Cecep juga aktif sebagai pembicara dalam berbagai seminar berskala nasional dan internasional.
- Cecep Hidayat menamatkan jenjang Sarjana Ilmu Politik dari FISIP UI, dan gelar dual magister dalam Integrasi Regional (IMRI/International Masters in Regional Integration) dari *the Asia-Europe Institute, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia* dan *Centro Internacional Carlos V, Universidad Autonoma de Madrid, Spanyol*.

Bibliografi

- Anwar, M. Syafi'i (ed.) (1998). *Menggapai Kedaulatan Untuk Rakyat: 75 Tahun Prof. Miriam Budiardjo*. Bandung, Mizan.
 - Budiardjo, Miriam (1987). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta, Gramedia. Bab 7.
 - Budiardjo, Miriam. *Demokrasi di Indonesia*, Bab 7.
 - Budiardjo, Miriam. *Jurnal Ilmu Politik 10*.
-